

E-Readiness Sistem Pelayanan Desa Aliantan (SISPEDAL) Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Jemis Julius B Ginting¹ Eko Handrian²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
Jemisjuliusbginting@student.uir.ac.id ekohandrian@soc.uir.ac.id

Received : July 23, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

The SISPEDAL website (Aliantan Village Service System) is a website that provides various forms of services and information in Aliantan village, Kabun sub-district, Rokan Hulu regency. This research was conducted to determine the readiness of the Aliantan village government in implementing e-government via the SISPEDAL website as perceived by the community. This type of research uses descriptive quantitative methods with primary data obtained through observation and distributing questionnaires, secondary data obtained through interviews with respondents. In this research the author uses e-readiness theory which contains three indicators, namely technological factors, human factors and institutional factors. The results of this research show that the SISPEDAL website has quite good e-government readiness, because there is still a lack of a signature feature so that people still have to come to the village office to get a signed letter, internet network limitations in several areas of Aliantan village mean that people cannot use the website SISPEDAL. Therefore, the village government must develop and improve the SISPEDAL website features that the community needs to support more effective and efficient services.

Keywords: E-Readiness, SISPEDAL Website

Abstrak

Website SISPEDAL (Sistem Pelayanan Desa Aliantan) merupakan website yang menyediakan berbagai bentuk pelayanan dan informasi di desa aliantan kecamatan kabun kabupaten rokan hulu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa aliantan dalam pelaksanaan e-government melalui website SISPEDAL yang dirasakan oleh masyarakat. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode kuantitatif dengan data primer diperoleh melalui observasi dan penyebaran kuisioner, data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan responden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori e-readiness yang terdapat tiga indikator yaitu faktor teknologi, faktor manusia, dan faktor institusional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa website SISPEDAL memiliki kesiapan e-government yang cukup baik, dikarenakan masih terdapat kekurangan fitur tanda tangan sehingga masyarakat masih harus datang ke kantor desa mengambil surat yang ditandatangani, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah desa aliantan sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan website SISPEDAL. Oleh karena itu pemerintah desa harus melakukan pengembangan dan peningkatan fitur-fitur website SISPEDAL yang dibutuhkan masyarakat dalam mendukung pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: E-Readiness, Website SISPEDAL

Pendahuluan

E-Government diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan proses pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah juga ikut mengadaptasi perkembangan e-government sebagai bentuk perubahan dan juga perkembangan teknologi informasi di Indonesia. E-Readiness sebagai ilmu yang mempelajari kesiapan individu atau suatu organisasi perusahaan dalam menerima teknologi informasi dan komunikasi turut mengambil peran sebagai langkah yang terlebih dahulu dilakukan agar produk E-Government dapat diterapkan dengan baik.

Sistem Pelayanan Desa Aliantan (SISPEDAL), sebagai salah satu bentuk penerapan e-government di Pemerintah Desa Aliantan. Inovasi ini dilakukan untuk menciptakan kondisi pelayanan yang lebih fleksibel, efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui kendala dalam penerapan SISPEDAL, hal tersebut bisa ditimbulkan dari kesiapan pemerintah desa Aliantan dalam perencanaan website SISPEDAL.

Desa Aliantan dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital, juga harus memenuhi standar pelayanan minimal yang menjadi dasar pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengatur standar pelayanan minimal di desa dalam PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa pasal 3 tentang SPM Desa yaitu mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat menurut kewenangannya sendiri, dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Desa.

Desa Aliantan telah mendukung PERBUB Rokan Hulu No 17 Tahun 2022, dengan melahirkan inovasi pelayanan berbasis digital, yang diberi nama SISPEDAL (Sistem Informasi Pelayanan Desa Aliantan). Implementasi SISPEDAL sejak diberlakukannya Surat Kepala Desa Aliantan Nomor:Ktps.141/PEM/I/2023, Tentang Penunjukan Operator/Admin Aplikasi Sistem Pelayanan Desa Aliantan (SISPEDAL).

E-readiness mengukur kesiapan penerapan e-government dari beberapa aspek seperti, teknologi, manusia, dan institusional (Musa, 2010). Dengan indikator e-readiness pemerintah desa dapat mengetahui kegagalan dalam perencanaan website SISPEDAL.

Sistem Pelayanan Desa Aliantan (SISPEDAL) merupakan sistem yang dibangun untuk mempermudah pemerintah desa menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan transparan. Sistem ini merupakan terobosan baru bagi Desa Aliantan, yang diselenggarakan sejak tahun 2023, dalam mengelola data dan proses pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat dalam rangka mewujudkan Good Governance, berlandaskan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Tinjauan Pustaka

Menurut Indrajit, et al (2005) menjelaskan pengertian e-Readiness merupakan suatu proses pemeringkatan dalam menilai tingkat kesiapan suatu negara dalam memanfaatkan teknologi informasi melalui pelaksanaan e-Government.

Pengertian e-readiness Adegboyega Ojo, et al (2007:1) diartikan e-readiness merupakan alat elektronik untuk mengukur seberapa baik masyarakat ditempatkan untuk

memanfaatkan peluang yang disediakan oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Infrastruktur TIK, sumber daya manusia, regulasi, kebijakan, dan penetrasi internet merupakan komponen penting e-readiness.”

Menurut Rahman (2007:1) mendefinisikan e-readiness adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara dalam memanfaatkan internet sebagai mesin teknologi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Pengertian e-readiness menurut Economist Intelligence Unit (2006:1) dapat diartikan e-readiness merupakan suatu “keadaan” informasi dan komunikasi suatu negara berupa infrastruktur teknologi (TIK) dan kemampuan konsumen, dunia usaha dan pemerintah untuk memanfaatkan TIK demi keuntungan mereka.

Pengertian e-readiness Budhiarja dan Sachdeva (2002) dapat diartikan e-readiness sebagai alat untuk mengukur kesiapan elektronik suatu negara yang membahas tingkat suatu komunitas dalam memenuhi syarat untuk dapat berpartisipasi dalam penggunaan teknologi.

Menurut Musa (2010) dalam penelitiannya mengemukakan tiga indikator dalam mengukur e-readiness di tingkat pemerintah daerah yaitu faktor teknologi, faktor manusia, dan faktor institusional

1. Faktor Teknologi

- 1). Ketersediaan (Availability), adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
 - a. Akses menggunakan website SISPEDAL yang jelas dan mudah
 - b. Segala jenis pelayanan dan informasi desa dapat diakses melalui website SISPEDAL
- 2). Keandalan (Realibility), adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
 - a. Pelayanan yang cepat dan tepat waktu
 - b. Dapat diakses oleh semua browser
- 3). Penetrasi Internet, adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
 - a. Website dapat diakses oleh semua kartu data
 - b. Jaringan yang mudah diakses di Desa Aliantan
- 4). Biaya, adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
 - a. Biaya penggunaan pelayanan SISPEDAL
 - b. Biaya yang dikeluarkan untuk mengakses jaringan internet
 - c. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan website SISPEDAL

2. Faktor Manusia

- 1). Kepercayaan terhadap pemerintah, adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
 - a. Keamanan username dan password
 - b. Keamanan data pribadi masyarakat
 - c. Pelayanan yang transparan dan akuntabel
- 2). Partisipasi Masyarakat, adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :

- a. Partisipasi masyarakat mengakses segala bentuk pelayanan dan informasi desa melalui website SISPEDAL
 - b. Memberikan masukan dan saran mengenai website SISPEDAL
 - c. Memberikan kritik yang membangun mengenai pengembangan website SISPEDAL
- 3). Pendidikan, adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
- a. Pendidikan terakhir masyarakat yang cukup dalam mengakses website SISPEDAL
 - b. Pendidikan terakhir pegawai desa yang cukup dalam memberi pelayanan melalui website SISPEDAL
- 4). Kompetensi TIK, adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
- a. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK melalui website SISPEDAL
 - b. Kemampuan pegawai desa menggunakan TIK dalam memberi pelayanan melalui website SISPEDAL

3. Faktor Institusional

- 1). Online Service, adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
- a. Segala jenis pelayanan berbasis online
 - b. Segala bentuk informasi berbasis online
- 2). Integrasi, adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
- a. Penyesuaian website dengan kebutuhan masyarakat
 - b. Willingness (Political Will), adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
- 3). Komitmen pemerintah desa dalam mengembangkan website SISPEDAL
- a. Komitmen pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi penggunaan website SISPEDAL kepada masyarakat
 - b. Kebijakan Anggaran, adapun item penilaian pada indikator ini yaitu :
- 4). Penggunaan anggaran pembuatan website SISPEDAL yang jelas
- a. Penggunaan anggaran pengembangan website SISPEDAL yang jelas
 - b. Kebijakan Program

Metode

Tipe penelitian ini menggunakan survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kantor Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, kuisisioner dan data sekunder diperoleh dari buku, data, dokumen publikasi di kantor Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 88 orang diantaranya 8 orang pegawai kantor desa dan 80 orang masyarakat desa.

Setelah keseluruhan data terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data di kelompokkan dan di sesuaikan menurut jenis data yang di peroleh, kemudian akan dibahas dan di analisa dalam dua bentuk, yaitu data yang bersifat kualitatif akan di uraikan secara lengkap dan terperinci dalam bentuk kalimat. Kemudian data yang bersifat kuantitatif akan di tabulasikan atau disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase serta dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan induktif.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan pembahasan masing-masing indikator penelitian didapatkan rekapitulasi dari penelitian e-readiness sistem pelayanan desa aliantan (SISPEDAL) di desa aliantan kecamatan kabun kabupaten rokan hulu sebagai berikut :

Tabel 1.

Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Website SISPEDAL (Sistem Informasi Desa Aliantan) Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

| No. | Indikator | Responden | | | Jumlah |
|----------|----------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Efektif | Cukup Efektif | Kurang Efektif | |
| 1 | Faktor teknologi | 21 (54%) | 15 (37%) | 4 (9%) | 40 (100%) |
| 2 | Faktor manusia | 20 (49%) | 16 (42%) | 4 (9%) | 40 (100%) |
| 3 | Faktor institusional | 27 (67%) | 10 (26%) | 3 (7%) | 40 (100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Jumlah | 68 | 42 | 10 | 120 |
| | Ratar – rata | 23 | 14 | 3 | 80 |
| | Persentase | 57% | 35% | 8% | 100% |

Sumber : Data olahan hasil penelitian,2024

Dari hasil rekapitulasi yang penulis data dari hasil penyebaran kuisisioner pada masyarakat rata-rata berada pada kategori “ cukup efektif”.

Untuk indikator faktor teknologi masyarakat masih belum tersedia fitur tanda tangan digital, sehingga masyarakat masih harus datang ke kantor desa dan masyarakat juga masih belum memahami penggunaan berbagai ketersediaan fitur pelayanan website SISPEDAL yang membuat masyarakat kesulitan. Kehandalan website SISPEDAL memberikan layanan tepat waktu sudah cukup baik,namun kehandalan website SISPEDAL memberikan layanan tepat waktu masih bergantung pada penetrasi internet, hal tersebut dipengaruhi oleh penetrasi internet di beberapa wilayah desa aliantan yang belum terkoneksi dengan baik. Penetrasi internet desa aliantan saat ini masih belum terkoneksi disetiap RT, masih ada

beberapa RT yang belum mendapatkan akses internet. Sehingga masih ada masyarakat yang belum bisa menggunakan website SISPEDAL, dengan adanya website ini masyarakat merasa bahwa biaya dalam penggunaan website SISPEDAL lebih terjangkau dibandingkan dengan cara pelayanan manual, sehingga masyarakat hanya perlu mengeluarkan biaya kuota internet dalam melakukan pelayanan administrasi desa.

Untuk indikator faktor manusia masyarakat mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan website SISPEDAL, menjaga keamanan data pribadi masyarakat seperti ussename, password, dan data kependudukan lainnya yang disimpan ke dalam database, operator memastikan kewanaman data tidak disalahgunakan. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan website SISPEDAL masih cukup efektif, masyarakat masih ada yang kesulitan dalam penggunaan website SISPEDAL. Beberapa fitur pelayanan website SISPEDAL dinilai masyarakat masih cukup sulit untuk menggunakannya, memungkinkan masyarakat memiliki pengetahuan dasar dalam penggunaan teknologi berbasis website. Beberapa masyarakat yang terkendala dalam penggunaan website SISPEDAL juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Kompetensi TIK masyarakat cukup baik dalam penggunaan website SISPEDAL, masyarakat sudah mampu menggunakan teknologi dengan baik menggunakan android. Namun, hanya ada beberapa masyarakat berusia 40 tahun keatas yang masih gagap teknologi.

Untuk indikator faktor institusional penyampaian informasi desa di website SISPEDAL dinilai masih kurang efektif, desa jarang memberikan informasi melalui fitur berita desa di website SISPEDAL. Hal tersebut membuat masyarakat kurang mendapatkan akses informasi yang cepat melalui website SISPEDAL. Pemerintah desa aliantan mampu memanfaatkan situasi covid dalam mengembangkan pelayanan online, dengan menyatukan pelayanan manual menjadi pelayanan online, masyarakat bisa dengan mudah memanfaatkan jenis pelayanan online dalam memudahkan mengurus administrasi pelayanan desa. saat ini pemerintah desa telah berkomitmen dengan mengeluarkan anggaran setiap tahunnya kepada jasa pembuat website SISPEDAL, dengan tujuan pengembangan website SISPEDAL agar bisa bekerja lebih baik lagi. Pemerintah desa juga mengeluarkan anggaran setiap tahunnya untuk operator SISPEDAL, dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja dalam merespon penggunaan website SISPEDAL. Saat ini transparansi kebijakan anggaran website SISPEDAL dinilai kurang efektif, dikarenakan banyak warga yang belum mengetahui kebijakan anggaran dalam penggunaan website SISPEDAL. Informasi kebijakan program website SISPEDAL yang disampaikan kepada masyarakat masih kurang efektif, dikarenakan sosialisasi yang hanya dilakukan pemerintah sekali disetiap RT. Dengan adanya website SISPEDAL, pemerintah dinilai efektif dalam memenuhi instrumen hukum website SISPEDAL yang disampaikan pada musyawarah desa.

Tabel 2.

Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Manual SISPEDAL (Sistem Informasi Desa Aliantan) Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

| No | Indikator | Responden | | | Jumlah |
|----|-----------|-----------|---------------|----------------|--------|
| | | Efektif | Cukup efektif | Kurang Efektif | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Faktor teknologi | 17 (43%) | 15 (38%) | 8 (19%) | 40 (100%) |
| 2 | Faktor manusia | 13 (33%) | 15 (38%) | 12 (29%) | 40 (100%) |
| 3 | Faktor institusional | 17 (42%) | 16 (39%) | 7 (19%) | 40 (100%) |
| | Jumlah | 47 | 46 | 27 | 120 |
| | Ratar – rata | 16 | 15 | 9 | 40 |
| | Persentase | 39% | 38% | 23% | 100% |

Sumber : Data olahan penelitian, 2024

Dari hasil rekapitulasi yang penulis data dari hasil penyebaran kuisisioner pada masyarakat rata-rata berada pada kategori “ cukup efektif”.

Untuk indikator faktor teknologi masyarakat yang mengurus secara manual, masyarakat belum mengetahui cara penggunaan website SISPEDAL, Masyarakat mengeluhkan kurangnya pembinaan yang dilakukan pemerintah desa terkait penggunaan website SISPEDAL, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan website SISPEDAL.Masyarakat yang mengurus secara manual, pelayanan website SISPEDAL dinilai efektif memberikan pelayanan tepat waktu. Karena, setiap masyarakat yang mengurus secara langsung ke kantor desa akan dilayani oleh operator SISPEDAL, operator yang mengurus pelayanan masyarakat melalui website SISPEDAL. Pelayanan yang diurus juga siap dalam 1-2 hari saja, masyarakat yang mengurus secara manual, tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam mengurus pelayanan secara manual melalui operator SISPEDAL, pelayanan yang juga diakses melalui website SISPEDAL oleh operator tidak dikenakan biaya sama sekali kepada masyarakat. Akan tetapi, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi ke kantor kepala desa, sehingga pelayanan dinilai tidak efisien.

Untuk indikator faktor manusia,masyarakat yang mengurus secara manual, merasa pemerintah cukup baik dalam memberikan keamanan dalam pelayanan, dan menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat. masyarakat yang mengurus secara manual, partisipasi masyarakat dalam penggunaan website SISPEDAL masih kurang efektif. Masyarakat lebih memilih datang langsung ke kantor desa mengurus pelayanan secara manual, masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya website SISPEDAL, sehingga mereka tidak mengurus pelayanan website SISPEDAL.Kebanyakan masyarakat tamatan SMA, sehingga sudah memiliki pengetahuan dasar dalam penggunaan teknologi. Akan tetapi, masih ditemui beberapa masyarakat berpendidikan SMP yang merasa kesulitan dalam memahami penggunaan teknologi berbasis website. Sehingga bagi masyarakat yang berpendidikan rendah mereka lebih memilih pelayanan secara manual, karena keterbatasan pengetahuan mereka dalam penggunaan teknologi, kompetensi TIK masyarakat sudah cukup baik dalam penggunaa teknologi, masyarakat lebih sering menggunakan teknologi berbasis android dalam mendapatkan informasi. Akan tetapi, masih ditemui masyarakat yang berusia lebih tua yang masih kesulitan dalam penggunaan teknologi.

Untuk indikator faktor institusional masyarakat yang mengurus secara manual, online service website SISPEDAL dinilai cukup efektif dalam memudahkan pelayanan. Akan tetapi, masyarakat belum merasakan secara langsung kemudahan website SISPEDAL, dikarenakan masyarakat lebih memilih mengurus pelayanan secara manual ke kantor desa, pemerintah dinilai masih kurang dalam memberikan informasi mengenai program website SISPEDAL kepada masyarakat, pemerintah dinilai masih kurang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah dianggap mengabaikan keterbatasan masyarakat dalam menggunakan website SISPEDAL, sehingga tidak ada solusi bagi masyarakat yang belum menggunakan website SISPEDAL. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah desa hanya sekali melakukan sosialisasi di setiap RT pada awal diresmikan website akan tetapi pemerintah dianggap sudah memiliki instrumen hukum dalam pembuatan dan penggunaan website SISPEDAL.

Tabel 3.

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

| No | Indikator | Responden | | | Jumlah |
|---------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| | | Efektif | Cukup efektif | Kurang Efektif | |
| 1 | Faktor teknologi | 3 (37%) | 5 (63%) | 0 (0%) | 8 (100%) |
| 2 | Fektor manusia | 1 (16%) | 5 (63%) | 2 (22%) | 8 (100%) |
| 3 | Faktor institusional | 4 (44%) | 5 (56%) | 0 (0%) | 8 (100%) |
| Jumlah | | 8 | 15 | 2 | 24 |
| Ratar – rata | | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Persentase | | 35% | 65% | 0% | 100% |

Sumber : Data olahan penelitian, 2024

Dari hasil rekapitulasi yang penulis data dari hasil penyebaran kuisisioner pada pegawai kantor desa rata-rata berada pada kategori “ cukup efektif”.

Untuk indikator faktor teknologi website SISPEDAL saat ini sudah mendukung kebutuhan pelayanan yang diinginkan masyarakat. Masyarakat bisa lebih mudah mengurus pelayanan dimana saja melalui android, Masyarakat bisa menghemat waktu, dengan website SISPEDAL masyarakat bisa mengurus pelayanan kapan dan dimana saja, pelayanan yang diurus juga dijamin siap tepat waktu, terdapat beberapa pelayanan yang tidak tepat waktu dikarenakan kendala jaringan internet, namun masyarakat masih harus datang ke kantor desa, untuk mengambil surat pelayanan yang ditandatangani. Terdapat juga beberapa fitur website yang belum update, sehingga belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan

website SISPEDAL menjadi lebih efisien. Pemerintah desa juga mengeluarkan anggaran tiap tahunnya yang bersumber dari dana desa, yang dialokasikan untuk biaya server dan operator SISPEDAL.

Untuk indikator faktor manusia bahwa pemerintah desa juga menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang disimpan kedalam database, sehingga tidak ada yang bisa mengakses data tersebut, dan tidak disalahgunakan. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan website SISPEDAL saat ini dinilai masih kurang mendukung, sejak diresmikannya website SISPEDAL pada tahun 2022 partisipasi masyarakat masih sedikit dibandingkan jumlah penduduk aliantan. Masih banyak ditemui masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan website SISPEDAL, sehingga keterbatasan tersebut menghambat partisipasi masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat saat ini sudah cukup mendukung penggunaan website SISPEDAL, masyarakat desa didominasi tamatan SMA/ sederajat yang membuat masyarakat mempunyai pengetahuan dasar terkait penggunaan teknologi. Akan tetapi, masih ditemui masyarakat yang sudah tua kesulitan dalam penggunaan teknologi, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam penggunaan website SISPEDAL.

Untuk indikator faktor institusional Kebijakan online service website SISPEDAL berhasil memfasilitasi pelayanan dengan baik, meningkatkan kemudahan masyarakat dan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Integrasi atau penyatuan pelayanan yang sebelumnya manual menjadi pelayanan online dinilai cukup efektif, Masyarakat dapat mengakses semua layanan yang mereka butuhkan melalui satu platform, tanpa harus menghadapi proses yang membingungkan atau berbelit-belit. Pemerintah berkomitmen dengan mengalokasikan dana desa tiap tahunnya untuk biaya server website SISPEDAL, serta biaya operator SISPEDAL. Transparansi kebijakan anggaran website SISPEDAL telah disepakati pada saat musyawarah desa. Pemerintah tiap tahunnya membahas mengenai kebijakan anggaran website SISPEDAL melalui musyawarah desa, anggaran tersebut dialokasikan untuk biaya server dan operator SISPEDAL tiap tahunnya. Pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi diawal saat diresmikan website SISPEDAL, sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat di rumah setiap RT. Pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait cara dan fungsi penggunaan website SISPEDAL. Instrumen hukum website SISPEDAL berdasarkan SK yang diterbitkan kepala desa aliantan. Juga didukung dengan peraturan tentang anggaran desa dalam mendukung digitalisasi pemerintah desa.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa E-Readiness Sistem Pelayanan Desa Aliantan (SISPEDAL) Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu “cukup efektif”. Penilaian ini dikarenakan masih ditemui faktor penghambat dan kekurangan penggunaan website SISPEDAL, seperti belum tersedianya tanda tangan digital dalam pengurusan administrasi website SISPEDAL, sehingga masyarakat masih harus datang ke kantor untuk mendapatkan tanda tangan. Penetrasi internet di beberapa lokasi RT desa aliantan yang belum mendapat jaringan internet. Partisipasi masyarakat yang masih kurang efektif, dikarenakan masyarakat lebih banyak memilih datang langsung ke kantor desa. Informasi kebijakan program dan kebijakan anggaran website SISPEDAL juga belum efektif, karena masyarakat banyak yang belum mengetahui mengenai website SISPEDAL, salah satu penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai E-Readiness Sistem Pelayanan Desa Aliantan (SISPEDAL) di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu cukup efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat desa aliantan sebagai pengguna website SISPEDAL merasa cukup puas atas pelayanan administrasi desa melalui website SISPEDAL. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan didalam website seperti belum tersedianya tanda tangan digital, membuat masyarakat masih harus datang ke kantor desa. Partisipasi masyarakat yang kurang dalam menggunakan website SISPEDAL, yang disebabkan keterbatasan jaringan di beberapa RT yang belum mendapat jaringan internet, serta sosialisasi program website SISPEDAL yang kurang dari pemerintah kepada masyarakat.

Untuk mengetahui kesimpulan setiap indikator mengenai E-Readiness Sistem Pelayanan Desa Aliantan (SISPEDAL) di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Untuk indikator faktor teknologi berada pada kategori “cukup efektif”. Pada website SISPEDAL belum tersedia tanda tangan digital yang membuat masyarakat masih harus datang ke kantor desa, serta jaringan internet yang belum tersedia di beberapa RT di Desa Aliantan.

Untuk indikator faktor manusia berada pada kategori “cukup efektif”. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan website SISPEDAL masih kurang efektif, dikarenakan sosialisasi kebijakan program website SISPEDAL yang kurang efektif disampaikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui website SISPEDAL.

Untuk indikator faktor institusional berada pada kategori “cukup efektif”. Dengan adanya website SISPEDAL dapat meningkatkan kualitas pelayanan desa aliantan, penyatuan pelayanan dari sebelumnya manual menjadi online service mampu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, kurangnya sosialisasi terkait kebijakan program dan kebijakan anggaran website SISPEDAL mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan website SISPEDAL.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal :

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamim, S. (2019). *Organisasi birokrasi dan manajemen pemerintahan*. Pekanbaru:UIR PRESS.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta:Penerbit Gava Media.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:PT Bumi Aksara.

- Hidayat, L. M. (2007). Reformasi Administrasi : Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indiahono, D. (2009). Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta:Gava Media.
- Indrajit, R. E. (2002). Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:ANDI.
- Indrajit, R. E. (2005). e-Government In Action. Yogyakarta:Andi Offset.
- Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta:Penerbit Gava Media.
- Kurniawan, R. C. (2013). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Fiat Justia. Universitas Lampung:Vol 10.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:BPFE.
- Makmur. (2012). Filsafat Administrasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Maksudi, B. I. (2017). Dasar-dasar administrasi publik : dari klasis ke kontemporer. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Muluk, K. (2008). Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang: Bayu Media Publishing.
- Notoatmodjo, S. (2009). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Reneka Cipta.
- Nuraini. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Pekanbaru:Yayasan Aini Syam.
- Pasolong, H. (2013). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung:CV.Alfabeta.
- Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung:Alfabeta.
- Rianto, B. dkk. (2012). Polri dan Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Surabaya:Putra Media Nusantara.
- Rogers, E. M. (1995). "Diffusion of Innovations." 4 th ed. New York:Free Press.
- Satori, D., Komariah, A. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2017). Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Surabaya:Refika Aditama.
- Suaedi, F Dan Wardiyanto, B. (2010). Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance). Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sulistiyani, A. T. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Suryani, T. (2008). Perilaku Konsumen:Implikasi pada Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Syafiie, I. K. (2003). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta:Rineke Cipta.
- Syafri, W. (2012). Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta:Penerbit Erlangga.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.

- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.

- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.

- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.

- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the

- environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Taufiqurokhan. Evi, S. (2018). Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. Tangerang Selatan:UMJ PRESS.
- Wibawa, S. (2009). Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Yuniarsih, T. dan Suwatno. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Yussa, T. dan Andry, H. (2015). Perilaku Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Zauhar, S. (2007). Reformasi Administrasi. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Zulkifli, A. A. (2013). Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian,Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa,Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.
- Zulkifli. Yogia, M. A. (2014). Fungsi-fungsi Manajemen. Pekanbaru:Marpoyan Tujuh Publishing UIR.
- Ari, D. P. S., & Hanum, L. (2021). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Website Djp Terhadap Kepuasan Pengguna Dengan Modifikasi E Govqual." *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.15, No.1, 2021.
- Azab, N. A., Kamel, S., dan Dafoulas, G. (2009). "A suggested framework for assessing electronic government readiness in Egypt." *Electronic Journal of e-Government*, Vol.7, No.1, 2009.
- Economist Intelligence Unit. (2006). "The 2006 e-readiness rankings, A white paper from the Economist Intelligence Unit. Economist Intelligence Unit Written in co-operation with The IBM Institute for Business Value; London.
- Indrajit, R. E. (2006). "Mengukur Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Institusi Pendidikan (Suatu Pendekatan Kesiapan Pemegang Kepentingan (Stakeholder)). Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia, ITB, Bandung.
- Julianto, M. A., Ismanto, S. U., Sukarno, D. (2022). "E-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi Bimma (Bandung Integrated Manpower Management Applications)." *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, Vol.14, No.1, Agustus 2022.
- Kusnadi, D dan Ma'ruf, J. (2017). "Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Kelurahan (Studi Kasus: Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Pringsewu)". *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 5(3).

- Lopes, R. (2013). Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. *Governance*, 5(1).
- Musa, M. R. (2010). "An e-readiness Assessment Tool for Local Authorities : A Pilot Application to Iraq. American University in Cairo, Master's Thesis".
- Mutula, S. M., dan Brakel, P. V. (2006). "An evaluation of e-readiness assessment tools with respect to information access: Towards an integrated information rich tool." *International Journal of information Management: The Journal for Information Profesional*, 26(3).
- Nento, F., Nugroho, L. E., Selo. (2017). "Pengukuran E-Readiness Provinsi Gorontalo Dalam Penerapan Smart Government." *Prosiding Seminar Nasional Geotik 2017*. ISSN:2580-8796.
- Ojo, A., Janowski, T., dan Estevez, E. (2007). "Determining progress towards e-government – whate are the core indicators?."
- Stofkova, Katarina dan Katarina Gasova. (2017). "E-Government as a quality improvement tool for citizens services. International scientific conference on sustainable, modern and safe transport" (Internet). Slovakia, University of Zailina.

Regulasi :

- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.